





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Bupati Subandi Tekankan Empati dalam Kepemimpinan OPD

### Sidoarjo, Memorandum

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, memberikan penguatan dan motivasi kepada jajaran pimpinan perangkat daerah dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepala OPD. Acara yang dihadiri Bupati Subandi itu berlangsung pada Senin (17/11) malam.

Diikuti seluruh kepala OPD dan camat, bupati mengapresiasi tinggi kehadiran kepala BKN yang dinilai menjadi penyemangat baru bagi upaya peningkatan profesionalisme ASN Sidoarjo. "Kehadiran Prof Zudan merupakan kehormatan bagi kami semua dan menjadi semangat baru dalam memperkuat profesionalisme ASN di Kabupaten Sidoarjo," ter-

nya.

Bupati menegaskan, pembinaan ASN harus dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari penataan, pengembangan kompetensi, hingga penguatan karakter dan kepemimpinan. Menurutnya, keberhasilan organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya.

Ia menekankan pentingnya empati dalam memimpin,



Bupati Sidoarjo Subandi menghadiri peningkatan kapasitas kepala OPD.

sejalan dengan tema kegiatan *Empati dalam Komunikasi Kepemimpinan*. "Pemimpin yang baik tidak hanya cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mampu berempati, berkomunikasi efektif, dan memahami timnya," katanya.

Empati, lanjutnya, bu-

kan hanya soal menyampaikan instruksi, tetapi tentang membangun hubungan yang manusiawi dan bermakna antara pemimpin dengan bawahannya. "Kepala OPD harus menjadikan empati sebagai landasan pelayanan publik," tegasnya. (kri/san/epe)

### MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Percepat Penanganan Laka Lantas, Dinkes Pasang GPS di 62 Ambulans

Terhubung ke  
Pusat Komando 119

**SIDOARJO** – Pemkab Sidoarjo melalui dinas kesehatan (Dinkes) berupaya mempercepat layanan evakuasi kedaruratan. Termasuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalan raya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memasang GPS di 62 ambulans yang terhubung dengan pusat komando (Command Center) dari Public Safety Center (PSC) 119.

Kebijakan baru tak lepas dari tingginya permintaan mobil ambulans. Dari data

PSC 119, selama sepuluh bulan terakhir laporan permintaan bantuan ambulans mencapai 2.814 panggilan. Paling banyak permintaan bantuan di wilayah Sidoarjo, Waru, Gedangan, dan Taman. Panggilan juga datang dari luar Sidoarjo, jumlahnya mencapai 36 laporan.

Nah, dari 2.814 panggilan yang masuk 60 persen merupakan laporan penanganan laka lantas. Sehingga penanganannya harus cepat. Sedangkan sisanya seperti laporan evakuasi untuk pengantar ke RS, hingga pengecekan kesehatan di lokasi.

### Operator Pantau Ambulans Terdekat

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo dr. Danang Abdul Ghani mengungkapkan, pemasangan GPS menjadi langkah penting untuk mempercepat penugasan armada. "Jadi petugas operator PSC 119 bisa memantau posisi ambulans terdekat dengan laporan dan nantinya bisa cepat mendekati unit terdekat dengan lokasi kejadian," ujarnya kemarin (18/11).

Danang menjelaskan, GPS tersebut terpasang di ambulans milik 31 puskemas, 24 rumah sakit, serta sejumlah ambulans relawan. Se-

luruhnya terintegrasi dalam sistem pemantauan terpadu sehingga koordinasi antar-masing efisien.

### Respons Maksimal 15 Menit

Dengan dukungan teknologi ini, Dinkes menargetkan waktu respons maksimal 15 menit dari fasilitas kesehatan menuju lokasi kejadian. Bahkan dengan GPS diharapkan bisa kurang dari 15 menit. "Respon cepat sangat krusial untuk menekan risiko mortalitas maupun morbiditas pada pasien gawat darurat," paparnya. Danang mengungkapkan, program pemasangan GPS didapatkan dari dukungan CSR. (ezz/hen)



• Pemasangan GPS di 62 ambulans

• GPS terhubung ke pusat inti Command Center Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Sidoarjo

• Petugas Sintia Nur menerima panggilan darurat dari warga via telepon kembali (18/11). Layanan itu akan dimaksimalkan untuk pergerakan ambulans

• Target respons time maksimal 15 menit

Sumber: Pemkab Sidoarjo

LAPORAN: Petugas Command Center 119 Sintia Nur menerima panggilan darurat dari warga via telepon kembali (18/11). Layanan itu akan dimaksimalkan untuk pergerakan ambulans.

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

PENGECORAH:  
Proyek pembuatan gedung parkir RSUD RT Notopuro dikerjakan dengan bantuan ekskavator. Targetnya pembangunan selesai akhir tahun.



ANGGER ECHIAN/JAWA POS

## Gedung Parkir Anyar RSUD Mampu Tampung 125 Mobil

Progres Pembangunan Mencapai 72 Persen

SIDOARJO - Pembangunan gedung parkir bertingkat (*double deck*) di RSUD RT Notopuro diharapkan menjadi solusi kebutuhan parkir pasien. Nantinya, gedung baru itu mampu menampung 125 mobil.

Direktur RSUD RT Notopuro dr Atok Irawan mengatakan, keberadaan parkiran tingkat ini akan menjawab kebutuhan ruang parkir yang semakin mendesak. Itu juga mendukung lonjakan pasien dan pengunjung RS dalam dua tahun terakhir.

"Parkiran *double deck* itu akan bisa menambah daya tampung sebanyak 125 mo-



Rencananya ada jalur langsung menuju lantai 2. Sehingga pengunjung lebih mudah mengaksesnya."

**dr Atok Irawan**  
*Direktur RSUD RT Notopuro*

bil," katanya kemarin (18/11). Sehingga, total nantinya sebanyak 200 lebih mobil bisa ditampung di area RSUD. "Rencananya ada jalur langsung menuju lantai 2. Sehingga pengunjung lebih mudah mengaksesnya," kata Atok.

Tidak saja memperluas area parkir. Saat ini juga ada pengerjaan drainase di area depan rumah sakit. Proyeknya hampir rampung.

Menurut Atok, pelebaran drainase diharapkan dapat mengurangi persoalan banjir yang kerap terjadi selama ini akibat daya tampung air yang kurang memadai. Sebab hal itu juga masuk ke daftar keluhan pengunjung fasilitas kesehatan.

Atok mengatakan jika progres pembangunan parkiran tingkat hingga pertengahan November ini telah mencapai 72 persen. Pihak rumah sakit optimistis proyek tersebut selesai akhir tahun dan dapat diresmikan pada awal tahun depan. (eza/hen)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Wisma Tropodo Jadi Titik Paling Rawan Banjir di Waru

**SIDOARJO** -Dalam tiga pekan terakhir, Perumahan Wisma Tropodo sudah tiga kali mengalami banjir akibat hujan deras. Banjir disebabkan pompa air yang terhubung dengan drainase tidak bisa berjalan optimal.

Camat Waru Nawari mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Margga dan Sumber Daya Air (DPUBMSD) Sidoarjo untuk melakukan rehab pompa tersebut. "Dari pengecekan dengan bupati memang bermasalah. Kami akan segera rehab," paparnya.

Perumahan Wisma Tropodo menjadi salah titik yang paling rawan banjir di wilayah Waru. Terakhir banjir menggenang pada pekan lalu. Air bisa mencapai ketinggian 40 sentimeter. Perumahan tersebut juga menjadi akses alternatif dari Desa Tropodo ke Desa Kepuh Kiriman Waru.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan bahwa perlu ada pemeliharaan rutin drainase di kawasan perumahan



“

Saya minta ini ditangani cepat. Pompa air harus diganti, dan gorong-gorong yang tertutup segera dibuka.”

**Subandi**  
*Bupati Sidoarjo*

tersebut. "Saya minta ini ditangani cepat. Pompa air harus diganti, dan gorong-gorong yang tertutup segera dibuka," ujarnya.

Subandi meminta jajaran kecamatan dan dinas teknis melakukan percepatan penanganan serta memastikan seluruh saluran air di Wisma Tropodo berfungsi normal. "Kalau ada hambatan, laporan. Yang penting pekerjaan segera jalan. Kita ingin masalah banjir di permukiman bisa ditekan semaksimal mungkin," ujarnya. (eza/hen)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## SEBANYAK 3.862 PPPK PARUH WAKTU RESMI TERIMA SK

Bupati Sidoarjo Subandi Tekankan Pelayanan dengan Empati dan Berakhlak

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Nuansa haru dan bahagia membalut di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo. Di tengah langit yang kelabu mengandung awan hitam, wajah-wajah ceria justru nampak kepada 3.862 Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Ya, setalah lama mengabdi, akhirnya ujung penantian itu tiba. Meskipun langit tertutup awan pekat, mereka tetap semangat dan nampak khusus mengikuti prosesi penyerahan SK PPPK Paruh Waktu secara digital oleh Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Senin pagi (17/11/25).

Penyerahan tersebut menjadi momentum bersejarah bagi ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu. Mereka mempuh perjalanan panjang dalam proses seleksi, hingga akhirnya resmi menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Turut dihadiri oleh Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh; Plt. Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk membangun generasi aparatur yang modern, adaptif, dan berorientasi



pada hasil. Ia berpesan agar status baru ini diimbangi dengan peningkatan kinerja dan moralitas.

"Diharapkan untuk seluruh ASN dan PPPK di Sidoarjo tidak hanya bekerja dengan kompetensi, tetapi juga dengan hati dan berakhlak, serta semangat melayani bangsa," tegas H. Subandi di hadapan ribuan PPPK.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya bagi para aparatur untuk memahami sistem agar siap menghadapi

tantangan modern. Tujuannya, agar ASN dan PPPK mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

"Dengan empati, integritas, dan kolaborasi, ASN Sidoarjo akan tumbuh menjadi aparatur yang tidak hanya menjalankan tugas administratif saja, melainkan menjadikan penggerak perubahan yang positif di tengah masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrul-

lo, dalam arahannya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat SDM aparatur melalui pengangkatan PPPK. Ia mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk menjaga nama baik daerah melalui kerja sama dan kolaborasi yang solid.

"Mari kita juga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang profesional, jujur, dan berintegritas. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar, dan itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh

aparatur bersatu padu," kata Zudan.

Pelantikan massal ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihhan layanan publik sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ribuan PPPK yang dilantik hari ini siap ditempatkan di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis lainnya di lingkungan Pemkab Sidoarjo. (Kholt)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pemkab Hapus Denda Pajak Daerah, Warga Cukup Bayar Tanpa Proses Tambahan

KOTA-Pemkab Sidoarjo mulai menerapkan program penghapusan denda pajak daerah hingga Rabu, 8 April 2026. Kebijakan tersebut berlaku untuk PBB-P2, BPHTB dan sejumlah pajak daerah lainnya.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Noer Rochmawati mengatakan, mekanisme penghapusan denda dibuat sederhana agar mudah diakses masyarakat.

"Wajib pajak tinggal bayar saja, otomatis tidak ada dendanya," ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (18/11).

Nor Rochmati yang akrab disapa Ima itu memastikan, selama program berjalan tidak ada kenaikan tarif pajak. Dia ingin masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk menuntaskan kewajiban tanpa beban tambahan.

"Mboten, tidak ada kenaikan PBB selama program ini berlangsung," ujarnya.

Sosialisasi terkait penghapusan denda juga sudah dilakukan. Pihaknya telah meminta pe-

rangkat desa dan kecamatan ikut membantu menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat.

"Sebetulnya sudah ada dari desa atau kecamatan binsanya juga ada sosialisasi," jelasnya.

Ima ingin hal tersebut dapat mendorong warga segera menuntaskan kewajiban pajaknya.

Program itu sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat.

Pihaknya juga menyiapkan beragam kanal pembayaran agar wajib pajak bisa membayar dengan mudah.

Mulai dari layanan perbankan, marketplace, hingga gerai pembayaran ritel yang sudah bekerja sama.

"Penghapusan denda dapat mempercepat penyelesaian tunggakan pajak yang menumpuk selama bertahun-tahun, relaksasi ini kami harapkan berdampak positif terhadap stabilitas pendapatan daerah dan pelayanan publik," pungkasnya. (sai/vga)



PEMUTIHAN: Petugas BPPD Sidoarjo saat mendatangi salah satu restoran.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## 62 Ambulans Dipasangi GPS, Dinkes Targetkan Respon 15 Menit

KOTA-Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menargetkan percepatan layanan evakuasi darurat usai pemasangan GPS tracker di 62 ambulans. Teknologi tersebut langsung terhubung ke command center PSC 119.

Perangkat GPS tersebut merupakan dukungan CSR dari PT Vastel Telematika Integrasi. Sehingga, setiap ambulans saat ini bisa dipantau secara real time.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo, dr. Danang Abdul Ghani mengatakan, GPS memungkinkan PSC 119 menugaskan ambulans terdekat secara cepat.

"Ini untuk mempercepat command center dalam menentukan armada terdekat dari korban," ucapnya kepada Radar Sidoarjo,

Selasa (18/11).

Dia menjelaskan, pemasangan GPS mencakup ambulans milik 31 puskesmas, 24 rumah sakit serta ambulans relawan. Semua unit tersebut terintegrasi dalam sistem pemantauan terpadu.

Danang menegaskan, pihaknya menargetkan respon time maksimal 15 menit dari fasilitas kesehatan menuju lokasi kejadian.

"Fast respon ini sangat penting untuk menekan risiko mortalitas dan morbiditas," ujarnya.

Pihaknya kini juga mulai menghimpun data permintaan ambulans yang masuk ke PSC 119. Data itu akan digunakan untuk evaluasi dan penguatan layanan gawat darurat.

● Ke Halaman 10



### 62 Ambulans...

Selain di Sidoarjo, program tersebut juga diterapkan pada ambulans di Surabaya dan Gresik. Dinkes menilai kerja sama CSR sepe-

ti itu sangat mendukung peningkatan kualitas layanan medis di Sidoarjo.

"Alhamdulillah, 62 GPS ini sangat membantu kinerja kami dalam pelayanan medis," pungkasnya. (sai/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Hari Kedua Operasi Zebra Semeru, Polsek Balongbendo Pasang Banner di Jalur Tengkorak



ANTISIPASI: Polsek Balongbendo pasang banner imbauan dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025.

BALONGBENDO-Hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025, jajaran Polsek Balongbendo kembali melakukan kegiatan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Petugas memasang banner imbauan di sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Selasa (18/11).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kanit Lantas Polsek Balongbendo Ipda Sugeng Hariyono, bersama Aipda Iful Subagyo dan Aipda Sugeng Supriyanto.

Mereka menyiapkan dua lokasi strategis, yakni Simpang Empat Traffic Light (TL) Desa Bakalan Wringinputu dan jalur black spot atau "jalur tengkorak" di Desa Bakungtemengungan.

Kapolsek Balongbendo AKP Sugeng Sulistiyono menjelaskan, pemasangan

banner ini merupakan bagian dari langkah preventif dalam Operasi Zebra Semeru yang berlangsung mulai Senin, 17 hingga Minggu, 30 November 2025.

"Pemasangan banner ini kami lakukan di titik-titik yang mudah diakses masyarakat, terutama di lokasi yang memiliki potensi kerawanan kecelakaan. Tujuannya jelas, untuk mengingatkan pengendara agar lebih tertib dan berhati-hati," ujar AKP Sugeng, Selasa (18/11) ke Radar Sidoarjo.

Ia menegaskan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan efek edukatif bagi para pengguna jalan.

"Dengan adanya Operasi Zebra Semeru 2025, kami ingin mewujudkan kameltibcarlantas yang aman dan nyaman. Selain itu juga untuk mengurangi angka kecelakaan serta mencegah fatalitas korban," pungkasnya. (dik/vga)

 **RADAR  
SIDOARJO.ID**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Dispendikbud Verifikasi 62 TK-PAUD untuk Distribusi Papan Interaktif Digital



Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tarto Adi

KOAT-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo memverifikasi TK dan PAUD yang bisa mendapatkan papan interaktif digital dari pemerintah pusat. Sebanyak 65 TK-PAUD telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas teknologi pembelajaran.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tarto Adi mengatakan, distribusi papan interaktif tersebut sudah melalui proses verifikasi.

"Total penerima papan interaktif ada 65 lembaga, didominasi oleh TK

sebanyak 52 sekolah, sementara KB/PAUD ada 13 lembaga," ucapnya, Selasa (18/11).

Tarto menjelaskan, kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak adalah Sidoarjo Kota, Buruan dan Sukodono. Menurutnya, TK-PAUD yang terverifikasi memiliki kesiapan infrastruktur yang baik.

"Sejumlah sekolah itu secara bangunan siap untuk bisa menerima papan interaktif," ujarnya.

Selain menyiapkan sarana fisik, pihaknya juga telah memberikan pelati-

han kepada guru dan tenaga pengajar. Hal itu dilakukan agar perangkat teknologi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembelajaran di kelas.

"Beberapa guru sudah mendapatkan pelatihan untuk pemanfaatan papan interaktif," jelasnya.

"Kami berharap, penggunaan papan interaktif ini mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran interaktif dan berbasis teknologi," pungkasnya. (sai/vga)

 RADAR  
SIDOARJO.ID



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Sidoarjo Subandi dalam foto bersama.

## Bupati Sidoarjo Tekankan Pentingnya Empati dalam Kepemimpinan OPD

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertema 'Empati dalam Komunikasi Kepemimpinan', kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan ASN mulai dari penataan, pengembangan, hingga penguatan karakter dan kepemimpinan.

Dalam arahannya, Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya pemimpin berkualitas dalam sebuah organisasi

pemerintahan. Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya sekedar mengarahkan, melainkan membangun hubungan yang manusiawi dan bermakna.

Ia menilai keberhasilan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin yang baik tidak hanya cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mampu berempati, berkomunikasi efektif, dan tahu menghadapi dininya.

"Untuk itu melalui kegiatan ini, para Kepala OPD diharapkan

mampu mengasah komunikasi empati, menumbuhkan kecerdasan emosional, meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan bawahan dan masyarakat, serta menjadikan empati sebagai landasan pelayanan publik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo terus mendorong birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi hasil. Namun menurutnya, reformasi birokrasi hanya akan berhasil dengan kepemimpinan yang kuat dan

berkarakter. Oleh karena itu, para Kepala OPD harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai AKHLAK dan semangat Bangga Melayani Bangsa.

"Kami menghendaki agar ASN Sidoarjo tidak hanya kompeten, melainkan juga bekerja dengan sepenuh hati. Empati, integritas, dan kolaborasi harus menjadi esensi dalam pelayanan publik. Apabila setiap pemimpin mampu berkomunikasi dengan empati dan berorientasi pada solusi, maka organisasi akan berkembang secara sehat, pro-

duktif, dan membawa perubahan positif," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Subandi bersama bersama Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati juga mengapresiasi kehadiran Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dalam acara ini.

"Kehadiran ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua, serta menjadi semangat baru dalam memperkuat profesionalisme ASN di Kabupaten Sidoarjo. Hadirinya yang saya hormati," ungkapnya. (md/rus)

HARIAN  
**BANGSA**  
Koran Warga Jatim



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, memberikan penguatan dan motivasi Peningkatan Kapasitas Kepala OPD Sehingga (17/11/25)

LOET

## Minta Pemimpin OPD Tingkatkan Empati Lebih Humanis

**SIDOARJO** - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, hadir memberikan penguatan dan motivasi kepada jajaran pimpinan perangkat daerah dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala OPD yang digelar pada Senin sore (17/11/25).

Kegiatan yang diikuti seluruh Kepala OPD dan camat se-Kabupaten Sidoarjo tersebut dibuka oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M.Kn., bersama Sekretaris Daerah, Dr. Fenny Apridawati, M.Kes. Bupati Subandi menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Kepala BKN, yang dinilainya menjadi penyemangat baru bagi upaya peningkatan profesionalisme ASN di Kabupaten Sidoarjo.

"Kehadiran Prof. Zudan merupakan kehormatan bagi kami semua dan menjadi semangat baru dalam memperkuat profesionalisme ASN di bupati Sidoarjo," ujar Bupati Subandi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi menegaskan bahwa pembinaan ASN harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penataan, pengembangan kompetensi, hingga penguatan karakter dan kepemimpinan. Menurutnya, keberhasilan organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas para pemimpinnya.

Ia menekankan pentingnya empati dalam memimpin, sejalan dengan tema kegiatan yaitu "Empati dalam Komunikasi Kepemimpinan."

"Pemimpin yang baik tidak hanya cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mampu berempati, berkomunikasi efektif, dan memahami timnya," katanya Senin sore kemarin.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa empati bukan sekadar kemampuan menyampaikan instruksi, melainkan upaya membangun hubungan yang manusiawi dan bermakna antara pemimpin dengan bawahannya.

"Para Kepala OPD diharapkan mampu mengasah komunikasi empatik, menumbuhkan kecerdasan emosional, serta meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan bawahan dan masyarakat. Empati harus menjadi landasan pelayanan publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk membangun birokrasi yang modern, adaptif, efektif, dan berorientasi hasil. Reformasi birokrasi, kata dia, hanya dapat berjalan bila para pemimpin memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan membangun komunikasi yang empatik.

Acara penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Sidoarjo dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih humanis sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui kepemimpinan yang lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. • Loe

**DUTA**  
BERITA



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Hearing Terkait Tertundanya Pencairan Insentif Guru TPQ



Liputan5news.com - Sidoarjo. Menindak lanjuti surat dari DPC Forum Komunikasi pendidikan Al Qur'an Indonesia Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 November 2025 perihal klarifikasi atas terbitnya surat dari PG - TPQ terkait belum berkenan tanda tangan pencairan insentif guru TPQ. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Menggelar rapat dengan pendapat (Hearing) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Kepala bagian hukum, Kepala bagian kesra dan Departemen Agama Sidoarjo. Senin (17/11/2025).

Acara yang dihadiri oleh pihak terkait tersebut di gelar di ruang rapat komisi kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung Nomor 38 Sidoarjo.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D H. Bangun Winarno dan dihadiri Anggota Komisi D diantaranya H. Sutadiji, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., Pratama Yudiarto, S.H., Wahyu Lumaksono, S.Pd., Hj. Fitrotin Hasanah.

Perwakilan dari kementerian Agama Sidoarjo menyampaikan ada ketua PG dan enam koordinator kecamatan datang ke kami untuk kroscek data - data yang kurang pas. Sesudah itu besoknya terbitlah surat tersebut ke berbagai instansi yang menyampaikan bahwa data kami tidak valid. Setelah itu terbit surat dari sebelah bahwa surat yang dibuat oleh PG tanpa ada koordinasi dengan pengurus lain.

Dalam pembicarannya di rapat dengar pendapat H. Bangun Winarno selaku pimpinan rapat menyampaikan kami dari komisi D menganggap bahwa guru TPQ yang berhak mendapat insentif adalah mereka yang sudah melalui proses verifikasi data.

"Tentunya kami dari komisi D memberikan saran jika di internal PG-TPQ ini sendiri tidak bisa bersatu tentunya insentif guru TPQ pada tahun ini tidak bisa cair. Dan tahun depan pastinya anggaran insentif tidak ada. Karena anggaran tahun ini tidak terserap, sehingga pengajuan anggaran untuk tahun depan tidak ada dasarnya. Sehingga dipastikan tahun depan tidak ada anggaran insentif guru TPQ."

Lanjut Bangun surat dari PG TPQ yang menyatakan bahwa data ini tidak valid ini jika tetap dijadikan persyaratan SK maka sangat berbahaya ketika ada data yang tidak valid.

Masih kata Bangun kami menyarankan kepada PG - TPQ agar di internal PG TPQ untuk berunding dan jika belum clear tolong disampaikan resiko - resiko. Kami dari DPRD sudah menyiapkan



anggaran, dari Diknas sudah siap bayar dan dari kemenag sudah berjuang untuk verifikasi data. Namun tinggal metik pencairannya saja tidak bisa.

"Kami sangat berharap ada sikap yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan ini," tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi D H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., menyampaikan sebelumnya pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran dengan harapan dua group ini bersatu dalam PG TPQ. Sesuai janji bupati akan menaikan insentif 100 persen. Namun jika dua group ini tidak bisa bersatu mana mungkin insentif ini naik 100 persen wong yang semester satu kemarin saja belum cair.

"Saya sangat berharap masalah ini bisa clear dan kedua group ini bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah ini sehingga insentif guru TPQ bisa segera dicairkan."

Tak ketinggalan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyampaikan bahwa dari TPQ tidak usah bingung masalah administrasi yang penting berapa jumlah guru TPQ yang berhak menerima insentif.

"Karena sampai sekarang belum ada kepastian data, kami pun juga kebingungan mau mencairkan. Kami sangat berharap dengan pertemuan ini bisa memberikan solusi yang terbaik," ungkapnya.

Sementara itu, Nur Salim selaku Ketua satu PG - TPQ menyampaikan bahwa untuk pencairan insentif guru ngaji sekabupaten Sidoarjo sesuai dengan keputusan pertemuan satu sampai delapan belas kali, apapun adanya bentuknya, jumlahnya saya atas nama PG - TPQ Sidoarjo yang dulunya 8.250 ribu berdasarkan teknis Kemenag Sidoarjo sebagai juknis persyaratan daerah tahun 2025 maka diambil kesimpulan bahwa kuota yang 8.250 itu diambil menjadi 5.593 ribu.

"Mengapa jumlahnya kok berkurang? Karena didasarkan BAP sesuai Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama sesuai data. Andaikan gurunya sepuluh, muridnya harus seratus lima puluh. Jadi satu dibanding lima belas itu bisa benar, tinggal pencairan saja," ungkapnya.

Nur Salim juga menyampaikan Kami dari PG - TPQ siap untuk menandatangi. Selama ini ada ketua umumnya tetapi tidak mau tanda tangan. Maka kami berusaha melayangkan surat ke DPRD, Dinas Pendidikan, Kemenag untuk melakukan hearing agar ini untuk diklarifikasi.

"Agar tau apa keputusan dari pemerintah Sidoarjo, guru - guru ngaji termasuk pengurus TPQ yang lainnya, menerima inti klarifikasi hari ini," tambahnya.

Lanjut Nur Salim alasan tidak mau menandatangani mungkin dulu ada Forum Komunikasi Ketua (FKK) kepala TPQ dan Forum Komunikasi Guru - guru Ngaji se-Indonesia. Lalu dijadikan satu sama bupati menjadi PG-TPQ. Dan karena merasa datanya banyak terus berkurang makanya dia tidak mau tanda tangan.

"Tertundanya penerimaan insentif ini karena layangan surat tidak sesuai dengan musyawarah, maka kami sebagai ketua satu mengusulkan sama teman - teman klarifikasi agar insentif ini segera dicairkan karena kasihan guru - guru ngaji," pungkasnya (Yanti)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Insentif Tertunda, Komisi D DPRD Sidoarjo Agar PG-TPQ Bersatu



Sidoarjo, ArjunganusantaraneWS.com, – Insentif tertunda Komisi D DPRD Sidoarjo sarankan internal PG-TPQ bersatu. Menindak lanjuti surat dari DPC Forum Komunikasi pendidikan Al Qur'an Indonesia Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 November 2025 perihal klarifikasi atas terbitnya surat dari PG – TPQ terkait belum berkenan tanda tangan pencairan insentif guru TPQ. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Menggelar rapat dengan pendapat (Hearing) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Kepala bagian hukum, Kepala bagian kesra dan Departemen Agama Sidoarjo. Senin (17/11/2025).

Acara yang dihadiri oleh pihak terkait tersebut di gelar di ruang rapat komisi, kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung Nomor 38 Sidoarjo.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D H. Bangun Winarno dan dihadiri Anggota Komisi D diantaranya H. Sutadii, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., Pratama Yudiarto, S.H., Wahyu Lumaksono, S.Pd., Hj. Fitrotin Hasanah.

Perwakilan dari kementerian Agama Sidoarjo menyampaikan ada ketua PG dan enam koordinator kecamatan datang ke kami untuk kroscek data – data yang kurang pas. Sesudah itu besoknya terbitlah surat tersebut ke berbagai instansi yang menyampaikan bahwa data kami tidak valid. Setelah itu terbit surat dari sebelah bahwa surat yang dibuat oleh PG tanpa ada koordinasi dengan pengurus lain.

Dalam pembicarannya di rapat dengar pendapat H. Bangun Winarno selaku pimpinan rapat menyampaikan kami dari komisi D menganggap bahwa guru TPQ yang berhak mendapat insentif adalah mereka yang sudah melalui proses verifikasi data.

"Tentunya kami dari komisi D memberikan saran jika di internal PG-TPQ ini sendiri tidak bisa bersatu tentunya insentif guru TPQ pada tahun ini tidak bisa cair. Dan tahun depan pastinya anggaran insentif tidak ada. Karena anggaran tahun ini tidak terserap, sehingga pengajuan anggaran untuk tahun depan tidak ada dasarnya. Sehingga dipastikan tahun depan tidak ada anggaran insentif guru TPQ.

Lanjut Bangun surat dari PG TPQ yang menyatakan bahwa data ini tidak valid ini jika tetap dijadikan persyaratan SK maka sangat berbahaya ketika ada data yang tidak valid.

Masih kata Bangun kami menyarankan kepada PG – TPQ agar di internal PG TPQ untuk berunding dan jika belum clear tolong disampaikan resiko – resiko. Kami dari DPRD sudah



menyiapkan anggaran, dari Diknas sudah siap bayar dan dari kemenag sudah berjuang untuk verifikasi data. Namun tinggal metik pencairannya saja tidak bisa.

"Kami sangat berharap ada sikap yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan ini," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., menyampaikan sebelumnya pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran dengan harapan dua group ini bersatu dalam PG TPQ. Sesuai janji bupati akan menaikkan insentif 100 persen. Namun jika dua group ini tidak bisa bersatu mana mungkin insentif ini naik 100 persen wong yang semester satu kemarin saja belum cair.

"Saya sangat berharap masalah ini bisa clear dan kedua group ini bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah ini sehingga insentif guru TPQ bisa segera dicairkan."

Tak ketinggalan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyampaikan bahwa dari TPQ tidak usah bingung masalah administrasi yang penting berapa jumlah guru TPQ yang berhak menerima insentif.

"Karena sampai sekarang belum ada kepastian data, kami pun juga kebingungan mau mencairkan. Kami sangat berharap dengan pertemuan ini bisa memberikan solusi yang terbaik," ungkapnya.

Insentif tertunda, Komisi D DPRD Sidoarjo sarankan internal PG-TPQ bersatu. Sementara itu, Nur Salim selaku Ketua satu PG – TPQ menyampaikan bahwa untuk pencairan insentif guru ngaji sekabupaten Sidoarjo sesuai dengan keputusan pertemuan satu sampai delapan belas kali, apapun adanya, bentuknya jumlahnya saya atas nama PG – TPQ Sidoarjo yang dulunya 8.250 ribu berdasarkan teknis Kemenag Sidoarjo sebagai juknis persyaratan daerah tahun 2025 maka diambil kesimpulan bahwa kuota yang 8.250 itu diambil menjadi 5.593 ribu.

"Mengapa jumlahnya kok berkurang? Karena didasarkan BAP sesuai Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama sesuai data. Andaikan gurunya sepuluh, muridnya harus seratus lima puluh. Jadi satu dibanding lima belas itu bisa benar, tinggal pencairan saja," ungkapnya.

Nur Salim juga menyampaikan Kami dari PG – TPQ siap untuk menandatangani. Selama ini ada ketua umumnya tetapi tidak mau tanda tangan. Maka kami berusaha melayangkan surat ke DPRD, Dinas Pendidikan, Kemenag untuk melakukan hearing agar ini untuk diklarifikasi.

"Agar tau apa keputusan dari pemerintah Sidoarjo, guru – guru ngaji termasuk pengurus TPQ yang lainnya menerima inti klarifikasi hari ini," tambahnya.

Lanjut Nur Salim alasan tidak mau menandatangani mungkin dulu ada Forum Komunikasi Ketua (FKK) kepala TPQ dan Forum Komunikasi Guru – guru Ngaji seIndonesia. Lalu dijadikan satu sama bupati menjadi PG-TPQ. Dan karena merasa datanya banyak terus berkurang makanya dia tidak mau tanda tangan.

"Tertundanya penerimaan insentif ini karena lavangan surat tidak sesuai dengan musyawarah, maka kami sebagai ketua satu mengusulkan sama teman – teman klarifikasi agar insentif ini segera dicairkan karena kasihan guru – guru ngaji," pungkasnya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Insentif Tertunda, Komisi D DPRD Sidoarjo Sarankan Internal PG-TPQ Bersatu



KaMedia – Menindak lanjuti surat dari DPC Forum Komunikasi pendidikan Al Qur'an Indonesia Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 November 2025 perihal klarifikasi atas terbitnya surat dari PG – TPQ terkait belum berkenan tanda tangan pencairan insentif guru TPQ. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Menggelar rapat dengan pendapat (Hearing) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Kepala bagian hukum, Kepala bagian kesra dan Departemen Agama Sidoarjo. Senin (17/11/2025).

Acara yang dihadiri oleh pihak terkait tersebut di gelar di ruang rapat komisi, kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung Nomor 38 Sidoarjo.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D H. Bangun Winarno dan dihadiri Anggota Komisi D diantaranya H. Sutadi, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., Pratama Yudiarto, S.H., Wahyu Lumaksono, S.Pd., Hj. Fitrotin Hasanah.

Perwakilan dari kementerian Agama Sidoarjo menyampaikan ada ketua PG dan enam koordinator kecamatan datang ke kami untuk kroscek data – data yang kurang pas. Sesudah itu besoknya terbitlah surat tersebut ke berbagai instansi yang menyampaikan bahwa data kami tidak valid. Setelah itu terbit surat dari sebelah bahwa surat yang dibuat oleh PG tanpa ada koordinasi dengan pengurus lain.

Dalam pembicarannya di rapat dengar pendapat H. Bangun Winarno selaku pimpinan rapat menyampaikan kami dari komisi D menganggap bahwa guru TPQ yang berhak mendapat insentif adalah mereka yang sudah melalui proses verifikasi data.

"Tentunya kami dari komisi D memberikan saran jika di internal PG-TPQ ini sendiri tidak bisa bersatu tentunya insentif guru TPQ pada tahun ini tidak bisa cair. Dan tahun depan pastinya anggaran insentif tidak ada. Karena anggaran tahun ini tidak terserap, sehingga pengajuan anggaran untuk tahun depan tidak ada dasarnya. Sehingga dipastikan tahun depan tidak ada anggaran insentif guru TPQ.

Lanjut Bangun surat dari PG TPQ yang menyatakan bahwa data ini tidak valid ini jika tetap dijadikan persyaratan SK maka sangat berbahaya ketika ada data yang tidak valid.

Masih kata Bangun kami menyarankan kepada PG – TPQ agar di internal PG TPQ untuk berunding dan jika belum clear tolong disampaikan resiko – resiko. Kami dari DPRD sudah



menyiapkan anggaran dari Diknas sudah siap bayar dan dari kemenag sudah berjuang untuk verifikasi data. Namun tinggal metik pencairannya saja tidak bisa.

"Kami sangat berharap ada sikap yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan ini," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H., menyampaikan sebelumnya pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran dengan harapan dua group ini bersatu dalam PG TPQ. Sesuai janji bupati akan menaikkan insentif 100 persen. Namun jika dua group ini tidak bisa bersatu mana mungkin insentif ini naik 100 persen wong yang semester satu kemarin saja belum cair.

"Saya sangat berharap masalah ini bisa clear dan kedua group ini bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah ini sehingga insentif guru TPQ bisa segera dicairkan."

Tak ketinggalan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyampaikan bahwa dari TPQ tidak usah bingung masalah administrasi yang penting berapa jumlah guru TPQ yang berhak menerima insentif.

"Karena sampai sekarang belum ada kepastian data, kami pun juga kebingungan mau mencairkannya. Kami sangat berharap dengan pertemuan ini bisa memberikan solusi yang terbaik," ungkapnya.

Insentif tertunda, Komisi D DPRD Sidoarjo sarankan internal PG-TPQ bersatu. Sementara itu, Nur Salim selaku Ketua satu PG – TPQ menyampaikan bahwa untuk pencairan insentif guru ngaji sekabupaten Sidoarjo sesuai dengan keputusan pertemuan satu sampai delapan belas kali, apapun adanya, bentuknya, jumlahnya, saya atas nama PG – TPQ Sidoarjo yang dulunya 8.250 ribu berdasarkan teknis Kemenag Sidoarjo sebagai juknis persyaratan daerah tahun 2025 maka diambil kesimpulan bahwa kuota yang 8.250 itu diambil menjadi 5.593 ribu.

"Mengapa jumlahnya kok berkurang? Karena didasarkan BAP sesuai Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama sesuai data. Andaikan gurunya sepuluh, muridnya harus seratus lima puluh. Jadi satu dibanding lima belas itu bisa benar, tinggal pencairan saja," ungkapnya.

Nur Salim juga menyampaikan Kami dari PG – TPQ siap untuk menandatangani. Selama ini ada ketua umumnya tetapi tidak mau tanda tangan. Maka kami berusaha melayangkan surat ke DPRD, Dinas Pendidikan, Kemenag untuk melakukan hearing agar ini untuk diklarifikasi.

"Agar tau apa keputusan dari pemerintah Sidoarjo, guru – guru ngaji termasuk pengurus TPQ yang lainnya, menerima inti klarifikasi hari ini," tambahnya.

Lanjut Nur Salim alasan tidak mau menandatangani mungkin dulu ada Forum Komunikasi Ketua (FKK) kepala TPQ dan Forum Komunikasi Guru – guru Ngaji seIndonesia. Lalu dijadikan satu sama bupati menjadi PG-TPQ. Dan karena merasa datanya banyak terus berkurang makanya dia tidak mau tanda tangan.

"Tertundanya penerimaan insentif ini karena layangan surat tidak sesuai dengan musyawarah, maka kami sebagai ketua satu mengusulkan sama teman – teman klarifikasi agar insentif ini segera dicairkan karena kasihan guru – guru ngaji," pungkasnya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kepala BKN RI: Tugas ASN Wujudkan Visi-Misi Kepala Daerah, Tidak Ada Pikiran Lain



KETIK, SIDOARJO – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Prof Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan aparatur sipil negara bahwa tugas mereka adalah mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Jika visi misi bupati dan wakil bupati sukses, misi gubernur dan wakil gubernur serta misi presiden dan wakil presiden juga akan sukses.

"Tugas saya sebagai kepala BKN adalah mewujudkan Asta Cita seperti perintah Bapak Presiden. Asta Cita itu terwujud jika visi-misi gubernur terwujud. Visi misi gubernur terwujud jika visi misi bupati dan wali kota terwujud," kata Zudan Arif Fakrulloh dalam forum Peningkatan Kapasitas Kepala OPD Pemkab Sidoarjo di Hotel Aston pada Senin (17 November 2025).

Sebagai kepala BKN, lanjut Zudan Arif, dirinya menggerakkan seluruh badan kepegawaian daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Jumlah ASN saat ini mencapai 5,6 juta orang. Januari 2025 lalu, jumlahnya masih 4,2 juta orang. Seluruh ASN digerakkan untuk melaksanakan Asta Cita.

Di Kabupaten Sidoarjo, tugas ASN adalah mewujudkan misi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo seperti dalam janji-janji kampanye. Janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan secara teknokratik oleh kepala-kepala OPD.

"Targetnya adalah wujudkan visi misi kepala daerah. Tidak ada pikiran lain," tegas Zudan Arif kepada kepala-kepala organisasi perangkat daerah di Pemkab Sidoarjo. Hadir pula Bupati Sidoarjo Subandi dan Sekretaris Daerah Fenny Apridawati.



Zudan Arif mencontohkan bagaimana mewujudkan visi misi kepala daerah itu. Misalnya Dinas Kesehatan Sidoarjo. Apakah angka stunting saat ini naik atau turun daripada tahun lalu. Plt Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lhaksmie menjawab naik.

Zudan Arif menegaskan bahwa angka stunting tidak boleh naik. Sebab, kalau angka stunting naik, itu berarti kualitas sumber daya manusia di Sidoarjo tidak unggul. Angka stunting harus ditekan serendah-rendahnya.

Dari tahun ke tahun, tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat harus diukur. Salah satunya, angka stunting tidak boleh naik. Harus turun. Dinas Pemerintah Desa (Pemdes) Sidoarjo dan Dinas Kesehatan serta puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sidoarjo harus turun tangan bareng.

"Jadi, kalau stunting naik, jangan teput tangan," tegasnya.

Begitu pula angka anak tidak sekolah (ATS). Zudan Arif menanyai Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Dr Tirto Adi. Tirto pun menjawab jumlah ATS turun. Dari sekitar 7.400-an menjadi sekitar 4.700-an. Setelah disisir dan ditangani, jumlahnya pun semakin menyusut.

"Bagaimana agar angka ATS bisa nol di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati," kata Zudan. Tirto Adi pun menyatakan siap melaksanakannya.

Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan pun kena tanya oleh Zudan Arif. Tolok ukur keberhasilan Satpol PP salah satunya adalah mewujudkan visi misi untuk menciptakan rasa aman dan tenteram di masyarakat.

"Sekarang kalau Satpol PP datang ke pasar, pedagang merasa tenang atau takut," ujar Zudan Arif.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## SIDOARJO MEMANAS: Dugaan Pengurukan Tanah Warisan Tanpa Izin di Krian Memicu Desakan Intervensi Bupati dan DPRD



SIDOARJO || Kasuaritv.com -Konflik pertanahan kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo, kali ini melibatkan dugaan pengurukan sebidang tanah warisan di Dusun Dongol, Desa Tempel, Kecamatan Krian, yang dilakukan secara misterius tanpa sepenuhnya ahli waris. Kasus ini kini menjadi sorotan tajam, memaksa keluarga korban mendesak Bupati Sidoarjo dan DPRD untuk turun tangan langsung karena menilai Pemerintah Desa Tempel berdiam diri.

Yoyok, salah satu ahli waris, mengaku sangat terkejut saat mengetahui lahan milik keluarganya di Dongol telah diuruk. Ia menegaskan, tanah tersebut adalah hasil pembelian sah almarhum ayahnya dari almarhum Yamin, yang dikuatkan oleh Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris Atang Suprayogi, S.H., pada 15 Maret 1997.

"Kami punya bukti hukum yang sah. Tanah ini dibeli langsung oleh bapak saya dan tidak pernah dijual lagi. Tapi tiba-tiba diuruk tanpa izin keluarga. Kami tidak tahu siapa yang berani melakukannya," ujar Yoyok dengan nada geram, Kamis (30/10/2025).

Aktivitas pengurukan ini, menurut Yoyok, pertama kali diketahui warga sekitar beberapa waktu lalu. Yang menjadi pertanyaan besar, hingga kini, tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak mana pun kepada keluarga, mengindikasikan kuatnya dugaan penyerobotan atau perusakan lahan jika dilakukan tanpa izin yang jelas.

Merasa dirugikan dan mencari kejelasan, Yoyok bersama keluarga mendatangi Kantor Pemerintah Desa Tempel pada Rabu (29/10/2025). Namun, pertemuan dengan Kepala Desa Ainul Yaqin dinilai gagal total lantaran jawaban yang diberikan tidak memberikan kepastian maupun solusi konkret.

Sikap terkesan lepas tangan pemerintah desa ini lah yang memicu langkah tegas dari ahli waris.

"Kami datang baik-baik ke balai desa, tapi tidak ada kejelasan. Kalau desa tidak bisa menyelesaikan, kami akan waduh ke Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wabup H. Mimik Idayana, dan DPRD Sidoarjo supaya kasus ini ditelusuri," tegas Yoyok.

Keluarga berharap Pemkab Sidoarjo segera turun tangan untuk meninjau langsung lokasi dan memastikan legalitas lahan, mencegah konflik berkepanjangan yang dipicu oleh sikap diam pemerintah desa yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.



Dokumen PPJB yang dimiliki keluarga Yoyok diketahui memiliki kekuatan hukum tetap, memuat sepuluh pasal perjanjian lengkap dengan materai, tanda tangan saksi, serta pengesahan notaris.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan konkret dari pihak desa untuk menghentikan aktivitas pengurukan maupun mengamankan lahan warga.

"Kami tidak menuduh siapa pun, tapi kami ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan. Pemerintah jangan tutup mata. Siapa pun yang bermain harus diungkap," tambah Yoyok.

Sementara itu, sejumlah warga sekitar turut menyoroti lemahnya pengawasan dan administrasi pertanahan di tingkat desa.

Mereka mendesak Pemkab Sidoarjo melalui dinas terkait untuk segera melakukan investigasi lapangan serta audit dokumen pertanahan di Desa Tempel.

"Kalau dibiarkan, nanti bisa jadi preseden buruk. Hari ini tanah warisan Yoyok, besok bisa tanah warga lain," ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, khawatir akan dampak jangka panjang.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena dianggap mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan transparansi administrasi pertanahan di tingkat desa. Masyarakat luas berharap pemerintah daerah hadir untuk melindungi hak-hak rakyat kecil serta menegakkan keadilan.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Tempel, Ainul Yaqin, belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Publik kini menanti respons cepat dari jajaran Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo untuk merespons aduan ahli waris.(\*)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Tanah Warisan Diuruk Tanpa Izin : Ahli Waris di Krian Desak Bupati dan DPRD Sidoarjo Intervensi, Kecam Sikap Kades Tempel



Sidoarjo || Agaranews.com -Konflik pertanahan kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo, kali ini melibatkan dugaan pengurukan sebidang tanah warisan di Dusun Dongol, Desa Tempel, Kecamatan Krian, yang dilakukan secara misterius tanpa sepenuhnya ahli waris. Kasus ini kini menjadi sorotan tajam, memaksa keluarga korban mendesak Bupati Sidoarjo dan DPRD untuk turun tangan langsung karena menilai Pemerintah Desa Tempel berdiam diri.

Yoyok, salah satu ahli waris, mengaku sangat terkejut saat mengetahui lahan milik keluarganya di Dongol telah diuruk. Ia menegaskan, tanah tersebut adalah hasil pembelian sah almarhum ayahnya dari almarhum Yamin, yang dikuatkan oleh Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris Atang Suprayogi, S.H., pada 15 Maret 1997.

"Kami punya bukti hukum yang sah. Tanah ini dibeli langsung oleh bapak saya dan tidak pernah dijual lagi. Tapi tiba-tiba diuruk tanpa izin keluarga. Kami tidak tahu siapa yang berani melakukannya," ujar Yoyok dengan nada geram, Kamis (30/10/2025).

Aktivitas pengurukan ini, menurut Yoyok, pertama kali diketahui warga sekitar beberapa waktu lalu. Yang menjadi pertanyaan besar, hingga kini, tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak mana pun kepada keluarga, mengindikasikan kuatnya dugaan penyerobotan atau perusakan lahan jika dilakukan tanpa izin yang jelas.

Merasa dirugikan dan mencari kejelasan, Yoyok bersama keluarga mendatangi Kantor Pemerintah Desa Tempel pada Rabu (29/10/2025). Namun, pertemuan dengan Kepala Desa Ainul Yaqin dinilai gagal total lantaran jawaban yang diberikan tidak memberikan kepastian maupun solusi konkret.

Sikap terkesan lepas tangan pemerintah desa ini lah yang memicu langkah tegas dari ahli waris.

"Kami datang baik-baik ke balai desa, tapi tidak ada kejelasan. Kalau desa tidak bisa menyelesaikan, kami akan wadul ke Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wabup H. Mimik Idayana, dan DPRD Sidoarjo supaya kasus ini ditelusuri," tegas Yoyok.



Keluarga berharap Pemkab Sidoarjo segera turun tangan untuk meninjau langsung lokasi dan memastikan legalitas lahan, mencegah konflik berkepanjangan yang dipicu oleh sikap diam pemerintah desa yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Dokumen PPJB yang dimiliki keluarga Yoyok diketahui memiliki kekuatan hukum tetap, memuat sepuluh pasal perjanjian lengkap dengan materai, tanda tangan saksi, serta pengesahan notaris.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan konkret dari pihak desa untuk menghentikan aktivitas pengurukan maupun mengamankan lahan warga.

"Kami tidak menuduh siapa pun, tapi kami ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan. Pemerintah jangan tutup mata. Siapa pun yang bermain harus diungkap," tambah Yoyok.

Sementara itu, sejumlah warga sekitar turut menyoroti lemahnya pengawasan dan administrasi pertanahan di tingkat desa.

Mereka mendesak Pemkab Sidoarjo melalui dinas terkait untuk segera melakukan investigasi lapangan serta audit dokumen pertanahan di Desa Tempel.

"Kalau dibiarkan, nanti bisa jadi preseden buruk. Hari ini tanah warisan Yoyok, besok bisa tanah warga lain," ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, khawatir akan dampak jangka panjang.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena dianggap mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan transparansi administrasi pertanahan di tingkat desa. Masyarakat luas berharap pemerintah daerah hadir untuk melindungi hak-hak rakyat kecil serta menegakkan keadilan.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Tempel, Ainul Yaqin, belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Publik kini menanti respons cepat dari jajaran Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo untuk merespons aduan ahli waris.(Arju Herman/Lia Hambali)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Ketua DPRD Sidoarjo Dorong Pemkab. Sidoarjo Lebih Intens Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal



Sidoarjo Metrosoerya.com

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo bagaikan jamur di musim hujan. hal itu fakta di lapangan banyak penjual rokok ilegal yang terang-terangan menjual dagangannya ke konsumen (penikmat rokok) dengan menggunakan sepeda motor.

Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih intens mencegah dan memberantas peredaran rokok yang tidak bercukai (illegal) karena sangat merugikan pemerintah dan kesehatan bagi penikmat rokok sendiri.

Menurut Cak Nasih panggilan akrab, rokok ilegal berpotensi bahaya karena tidak diketahui kandungannya tidak ada proses pengawasannya sehingga dikhawatirkan mengandung zat-zat yang dipandang berbahaya.

"Agar pemerintah ataupun aparat yang berwenang melakukan siapa pengawasan lebih rutin di lapangan baik di toko-toko kelontong atau penjual yang menggunakan sepeda motor. Jika diketahui menzedarkan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasknya. Selasa (17/11/2025).

Ia menambahkan dengan banyaknya peredaran rokok ilegal sangat berefek negatif bagi kelangsungan usaha UMKM dan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Karena itu sangat urgensi bagi pemerintah untuk terus menerus dan kontinu melakukan kontrol dan pengawasan karena resikonya kepada masyarakat ataupun perokok itu sendiri.

Politikus PKB ini juga menyarankan Pemkab Sidoarjo kepada pelaku usaha rokok agar menggunakan cara persuasif dengan cara pembinaan keterampilan, perizinan kepada pelaku UMKM.

"Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa membeli rokok ilegal dan murah justru berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan pembangunan daerah sekitar," urai Cak Nasih yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Sementara itu, ditemui di tempat terpisah Kasat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Dra. Yany Setyawan menyatakan bahwa pendekatan terhadap penjual rokok dan telah dilakukan operasi rokok ilegal.

"Intensif kita lakukan sekali, kegiatan ini harus didampingi oleh kami, belum bisa melaksanakan pendekatan sendiri tanpa didampingi, oleh kemudian hasil barang bukti ini semua dibawa dan diamankan," terang Yany.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo diperkirakan 9 juta batang, rencananya ada dua tempat pemusnahan yakni di Pendopo dan Porong, Pungkasnya (yun).





Sidoarjo, Gemah Nusantara – Usaha memperkuat birokrasi modern di Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan dorongan baru. Hal ini terlihat dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala OPD yang digelar pada Senin (17/11/2025), dengan menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrul Ich, sebagai narasumber utama.

Seluruh Kepala OPD dan para camat se-Kabupaten Sidoarjo hadir dalam agenda tersebut. Acara dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, SH, M.Kn, bersama Sekretaris Daerah Dr. Fenny Apriawati, M.Kes. Bupati Subandi menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Prof. Zudan yang disebutnya memberikan energi baru bagi penguatan kualitas profesionalisme ASN di Sidoarjo.

"Kehadiran Prof. Zudan merupakan kehormatan bagi kami semua dan menjadi semangat baru dalam memperkuat profesionalisme ASN di Kabupaten Sidoarjo," ujar Bupati Subandi.

Dalam permasarannya, Bupati Subandi menekankan bahwa pembinaan ASN tidak dapat dilakukan secara instan, namun harus dirancang berkesinambungan. Mulai dari penataan, peningkatan kompetensi, hingga pembentukan karakter dan kepemimpinan yang kuat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan akan sangat bergantung pada kapasitas pemimpinnya.



Dalam permasarannya, Bupati Subandi menekankan bahwa pembinaan ASN tidak dapat dilakukan secara instan, namun harus dirancang berkesinambungan. Mulai dari penataan, peningkatan kompetensi, hingga pembentukan karakter dan kepemimpinan yang kuat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan akan sangat bergantung pada kapasitas pemimpinnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan empati dalam memimpin, sejalan dengan tema kegiatan "Empati dalam Komunikasi Kepemimpinan."

"Pemimpin yang baik tidak hanya cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mampu berempati, berkomunikasi efektif, dan memahami timnya," katanya.

Lebih jauh, Bupati Subandi menekankan bahwa empati bukan sekadar memberikan instruksi dengan cara yang baik, tetapi menciptakan hubungan yang lebih manusiawi dan bermakna antara pemimpin dan anggota tim.

"Para Kepala OPD diharapkan mampu mengasah komunikasi empatik, menumbuhkan kecerdasan emosional, serta meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan bawahan dan masyarakat. Empati harus menjadi landasan pelajaran publik," terangnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan efektif. Memastinya, performasi birokrasi hanya dapat berhasil jika setiap pemimpin memiliki integritas yang kuat. (Lis)

